

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- \_\_\_\_\_, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib, 2011, *Sanksi Perdata Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Agustan Lely dan Khaitulnas, 2018, *Tata Kelola Kantor Notaris dan PPAT*, UII Press, Yogyakarta.
- Duha, Timotius, 2018, *Perilaku Organisasi*, Depublish, Yogyakarta.
- Hartanti dan Nisya Rifani, 2004, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan Kelima, Dunia Cerdas, Jakarta Timur.
- Prasetyo, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Grafindo, Jakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dala Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1985, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1997, *Pedoman Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta.
- Tedjo Saputro, Liliana, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- Tobing, G.H.S., Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Zed, Mestika, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Surat Edaran Nomor UM.MPPN.06.20-107 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris Selama Masa Pandemi Covid-19

## **C. THESIS**

Santoso, Regi, 2018, “Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengawasi Buku Daftar Akta (Repertorium) Notaris di Kabupaten Sleman”, Tesis, Program Magister Kenotariatan UGM.

Tampubolon, Junita, 2019, “Analisis Yuridis Akibat Hukum Dari Buku Daftar Akta Notaris Yang Tidak Ditandatangani dan Diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan USU.

## **D. INTERNET**

Kemenkumham DIY, “Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (SIEMON)”, <http://Siemon.kemenkumham.go.id> , diakses pada tanggal 9 Oktober 2020.